

**Analysis of Predatory Pricing Threshold in the NutraSweet Case of Canada:  
A Comparative Analysis Between the Regulation of Predatory Pricing Under  
Article 20 of Law No. 5 of 1999 and Section 79 of the Canadian Antitrust Act**

By:

Edward Wirayudha Himawan<sup>1</sup>, M. Hawin<sup>2</sup>

**Abstract**

The objective of this legal research is to conduct a comparative analysis of the regulation of predatory pricing under Article 20 of Indonesia's Law No. 5 of 1999 and Section 79 of the Canadian Antitrust Act. Predatory pricing, which is the intentional pricing of products or services below production costs to eliminate competition, presents substantial obstacles to the preservation of fair competition in markets. Indonesia and Canada implement distinct regulatory strategies that are indicative of their distinctive economic environments.

This legal research adopts a qualitative, juridical-comparative approach to analyze predatory pricing regulations in Indonesia and Canada. The study involves two methods: a literature review examining relevant laws, regulations, and judicial doctrines, and a comparative analysis of Article 20 of Indonesia's Law No. 5 of 1999 and Section 79 of the Canadian Antitrust Act, focusing on criteria for predatory pricing, cost thresholds, and recoupment tests.

This research concludes that Indonesia's predatory pricing regulation under Article 20 of Law No. 5 of 1999 is intent-driven and emphasizes pricing below production costs, but it lacks cost thresholds and economic analysis, in accordance with the aforementioned research methodologies and objectives. Canada's Section 79 of the Antitrust Act employs a more comprehensive framework that includes cost analysis and recoupment to differentiate between competitive and anti-competitive behavior, as demonstrated in the \*NutraSweet\* decision. The report also contrasts the enforcement and judicial methods of each jurisdiction, highlighting their advantages and disadvantages. This study contrasts and suggests the most effective strategies from the intricate regulatory framework of Canada in order to enhance Indonesia's competition law.

**Keywords: Predatory pricing, competition law, Indonesia, Canada, NutraSweet case, recoupment test, economic efficiency, market dominance.**

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, International Undergraduate Program.

<sup>2</sup> Professor at the Business Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***Analisis Ambang Batas Penetapan Jual Rugi dalam Kasus NutraSweet di  
Kanada: Analisis Komparatif Antara Pengaturan Penetapan Harga Predator  
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 79  
Undang-Undang Antimonopoli Kanada***

Oleh:

Edward Wirayudha Himawan<sup>1</sup>, M. Hawin.<sup>2</sup>

**Intisari**

*Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk melakukan analisis komparatif terhadap pengaturan mengenai jual rugi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan Pasal 79 Undang-Undang Antitrust Kanada. Jual rugi, yang merupakan praktik menetapkan harga produk atau jasa di bawah biaya produksi secara sengaja untuk mengeliminasi persaingan, menghadirkan tantangan besar dalam menjaga persaingan yang sehat di pasar. Indonesia dan Kanada menerapkan strategi regulasi yang berbeda, mencerminkan karakteristik lingkungan ekonomi masing-masing.*

*Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yuridis-komparatif untuk menganalisis regulasi predatory pricing di Indonesia dan Kanada. Penelitian ini dilakukan melalui dua metode: tinjauan pustaka yang mencakup analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum terkait, serta analisis komparatif antara Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 79 Undang-Undang Antitrust Kanada, dengan fokus pada kriteria jual rugi, ambang batas biaya, dan analisis recoupment.*

*Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi jual rugi di Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berorientasi pada niat pelaku dan menekankan pada penetapan harga di bawah biaya produksi, namun tidak mencakup ambang batas biaya dan analisis ekonomi, sebagaimana dijelaskan melalui metodologi dan tujuan penelitian yang telah disebutkan. Sebaliknya, Pasal 79 Undang-Undang Antitrust Kanada menerapkan kerangka kerja yang lebih komprehensif, termasuk analisis biaya dan recoupment untuk membedakan antara perilaku kompetitif dan anti-kompetitif, seperti yang ditunjukkan dalam kasus NutraSweet. Laporan ini juga membandingkan metode penegakan dan yudisial di masing-masing yurisdiksi, menyoroti kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini merekomendasikan strategi terbaik dari kerangka regulasi Kanada yang lebih rinci untuk meningkatkan hukum persaingan di Indonesia.*

***Kata kunci: Jual Rugi, Hukum Persaingan, Indonesia, Kanada, Kasus NutraSweet, Uji Recoupment, Efisiensi Ekonomi, Dominasi Pasar***

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, International Undergraduate Program.

<sup>2</sup> Professor at the Business Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.